Analisis Peran Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) dalam Implementasi Perdagangan Karbon Hutan di
Indonesia: Studi Kasus PT Mutuagung Lestari Tbk
Lutfiyyah Roihanah, Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.; Ir. Hermudananto, S.Hut., M.Sc. IPM.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANALISIS PERAN LEMBAGA VALIDASI DAN VERIFIKASI (LVV) DALAM IMPLEMENTASI PERDAGANGAN KARBON HUTAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Lutfiyyah Roihanah[1], Teguh Yuwono[2], Hermudananto[2]

INTISARI

Sektor kehutanan menjadi tulang punggung pencapaian target NDC Indonesia, namun keberhasilan perdagangan karbon kehutanan sangat bergantung pada kredibilitas unit karbon yang dijamin melalui proses validasi dan verifikasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan, serta mengidentifikasi peluang dan kontribusi LVV dalam mendukung perdagangan karbon kehutanan di Indonesia, dengan PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) sebagai studi kasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber internal MUTU International serta narasumber eksternal dari Komite Akreditasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan RCCC-UI, serta dilengkapi dengan observasi dan studi dokumen. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 15.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUTU International menjalankan lima peran utama dalam validasi dan verifikasi karbon, namun menghadapi enam tantangan multidimensional yang bersumber dari regulasi, metodologi, aspek kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini juga mengidentifikasi lima peluang pengembangan serta empat kontribusi nyata LVV dalam memperkuat sistem perdagangan karbon nasional. Dapat disimpulkan bahwa LVV memiliki posisi strategis dan tidak tergantikan dalam menjamin integritas perdagangan karbon kehutanan, sehingga penguatan melalui rekomendasi kebijakan, seperti percepatan Sistem Registri Unit Karbon, penyusunan metodologi sektoral, serta penguatan kerja sama akreditasi internasional, menjadi agenda mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: akreditasi, sistem MRV, Sistem Registri Unit Karbon, kredit karbon, rekomendasi kebijakan

[1] Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
[2] Staff Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Peran Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) dalam Implementasi Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia: Studi Kasus PT Mutuagung Lestari Tbk
Lutfiyyah Roihanah, Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.; Ir. Hermudananto, S.Hut., M.Sc. IPM.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANALYSIS OF THE ROLE OF VALIDATION AND VERIFICATION BODIES (VVBs) IN THE IMPLEMENTATION OF FOREST CARBON TRADING IN INDONESIA: A CASE STUDY OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Lutfiyyah Roihanah[1], Teguh Yuwono[2], Hermudananto[2]

ABSTRACT

The forestry sector serves as the backbone of Indonesia's NDC target, yet the success of forest carbon trading largely depends on the credibility of carbon units, which is ensured through the validation and verification process carried out by Validation and Verification Bodies (VVBs). This study aims to analyze the roles and challenges, and to identify the opportunities and contributions of VVBs in supporting forest carbon trading in Indonesia, using PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) as a case study.

This research employed a qualitative case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews with internal informants from MUTU International and external informants from the National Accreditation Committee, the Ministry of Environment, the Ministry of Forestry, and RCCC-UI, complemented by observation and document review. Data were analyzed thematically using NVivo 15 software.

The findings show that MUTU International plays five key roles in carbon validation and verification, while facing six multidimensional challenges rooted in regulatory, methodological, institutional, and human resource capacity issues. The study also identifies five development opportunities and four tangible contributions of VVBs in strengthening the national carbon trading system. It can be concluded that VVBs hold a strategic and irreplaceable position in safeguarding the integrity of forest carbon trading, making their reinforcement, through policy recommendations such as accelerating the Carbon Unit Registry System, developing sector-specific methodologies, and strengthening international accreditation cooperation, an urgent agenda for all stakeholders.

Keywords: *accreditation, MRV system, Carbon Unit Registry System, carbon credit, policy recommendation*

[1] Student of Faculty of Forestry Universitas Gadjah Mada
[2] Lecturer of Faculty of Forestry Universitas Gadjah Mada